

**PENGARUH PERKEMBANGAN KOPERASI TERHADAP KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
2006-2019**

Endang Kusdiah Ningsih¹, Dwi Eka Novianty², Sri Ermeila³

¹Universitas IBA, Palembang, Indonesia, endanghasan62@gmail.com

²Universitas IBA, Palembang, Indonesia, dwiekan@gmail.com

³Universitas IBA, Palembang, Indonesia, ermeilasri05@gmail.com

Abstract

The implementation of cooperative's function is to reduce unemployment and alleviate poverty, in one condition, that the cooperative growing rapidly. Therefore, the main objective of this article is to know the effect of cooperative growth on poverty and unemployment, in South Sumatera Province in terms of 2006-2019. The analysis based on secondary data obtained from the Regional Bureau of Statistics. The result of the analysis is cooperative growth influence only 0,3% to poverty and, 1,6% to unemployment. In other words, cooperative growth is no significant effect on poverty and unemployment. That is because the cooperative inability to grow and most of the cooperative have many problems both internal and external.

Keywords : *Cooperative, Poverty, Unemployment*

PENDAHULUAN

Koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan soko guru bagi perekonomian Indonesia, merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1), koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu keberadaan koperasi dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Fungsi koperasi menurut Muljono (2013, h3) adalah: (a) memberikan kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha, (b) memberikan keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU), (c) mengembangkan usaha anggota koperasi dan (d)

meniadakan praktek rentenir. Implementasi dari fungsi koperasi tersebut menjelaskan bahwa perkembangan usaha anggota koperasi dapat membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, dengan berkembangnya usaha koperasi, berdampak pada meningkatnya pendapatan anggota dan masyarakat sekitar sehingga tidak lagi berada pada garis kemiskinan. Dengan demikian, perkembangan koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Perkembangan koperasi di Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2015, terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,3 setiap tahun. Akan tetapi pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 148.220 atau 1,3 % dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017, jumlah koperasi mengalami peningkatan sebesar 2,7% dari tahun 2016. Dengan demikian rata-rata perkembangan jumlah koperasi di Indonesia dari tahun 2006 – 2017 adalah 3,70%. Seiring dengan perkembangan koperasi, tingkat kemiskinan di Indonesia, dalam periode 2006-2019, secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 3,1% per tahun dan tingkat pengangguran mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,2% per tahun.

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah propinsi di Indonesia, mempunyai banyak koperasi, dengan tingkat perkembangan rata-rata setiap tahun 2,8% selama periode waktu 2006-2019. Jumlah koperasi aktif dan tingkat perkembangan koperasi di provinsi Sumatera Selatan diperlihatkan pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Jumlah dan Perkembangan Koperasi Aktif Di Provinsi Sumatera Selatan 2006-2019

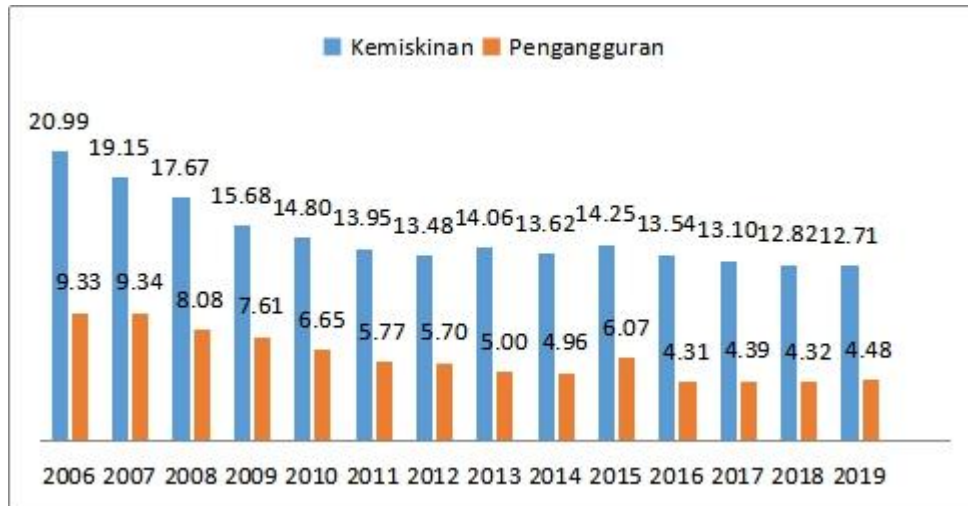
Tahun	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	Perkembangan (%)
2006	2816,0	-
2007	2818,0	0,1
2008	3001,0	6,5
2009	3146,0	4,8
2010	3160,0	0,4
2011	3461,0	9,5
2012	4609,0	33,2
2013	4227,0	-8,3
2014	4336,0	2,6
2015	4450,0	2,6
2016	3836,0	-13,8
2017	3851,0	0,4
2018	3738,0	-2,9
2019	3888,0	4,0

Sumber : BPS SS

Perkembangan jumlah koperasi tertinggi, terjadi pada tahun 2012, dengan persentase peningkatan sebesar 33,2%, dan terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu -13,8%.

Menurut Wahyu (2014) perkembangan koperasi menunjukkan fakta mengesankan saat dielaborasi dengan data kemiskinan dan pengangguran dimana peningkatan jumlah unit dan anggota koperasi berimbas pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Perkembangan tingkat kemiskinan dan pengangguran di provinsi Sumatera Selatan, terlihat dalam gambar 1, berikut ini :

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan 2006-2019



Sumber : BPS SS

Tingkat Pengangguran di provinsi Sumatera Selatan selama periode 2006 – 2019 rata-rata sebesar 6,14% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional yang mengalami penurunan rata-rata -3,1%. Sedangkan tingkat kemiskinan dalam periode yang sama rata-rata 14,99%, berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan nasional yang mengalami penurunan rata-rata -3,2% per tahun.

Menurut Murtyoso, (2018), untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, maka jalan keluar yang harus dilakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Ikbal, et.all (2018), melakukan penelitian dengan judul Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kota Palopo, membuktikan bahwa UMKM secara signifikan berpengaruh terhadap pengangguran. Selanjutnya, Setiawan (2017), melakukan penelitian dengan judul Peran UMKM Dalam Upaya Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan: Pelajaran Dari Penerapan JATIMNOMICS Di Blitar, membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Timur. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris, pengaruh perkembangan jumlah koperasi terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2006-2019.

Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Secara formal, pengertian koperasi sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pasal 1, yaitu :”Koperasi: badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi “

Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM, kontribusi koperasi hingga bulan Juni 2019 mencapai 5,1% terhadap PDB Indonesia, dibandingkan pada tahun 2014 sekitar 1,7%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Walaupun dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia menemui banyak persoalan internal, yaitu komitmen para anggota untuk saling memiliki koperasi.

Kemiskinan

Masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan, seperti kekurangan makanan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang kompleks dan multidimensi sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan menerapkan strategi yang komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan (Sugandi, 2016)

Menurut Bappenas, (2018) konsep kemiskinan dibedakan dalam dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.

Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antarkelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan. nasional

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia sampai dengan bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Angka ini menurun 80 ribu penduduk dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi persentase, jumlah penduduk miskin pada periode tersebut adalah 9,41% atau turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 9,82%.

Pengangguran

Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari kerja tetapi belum memperolehnya. (Sukirno, 2011, h28). Penyebab terjadinya

pengangguran antara lain yaitu (1) ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, (2) kemajuan teknologi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imsar, dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode 1989-2016, membuktikan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran periode sebelumnya secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

Menurut Nugroho, (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengangguran di Indonesia periode 1998-2014, bahwa variabel pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi dan angka kemiskinan positif dan signifikan mempengaruhi jumlah pengangguran.

METODE PENELITIAN

Sumber data

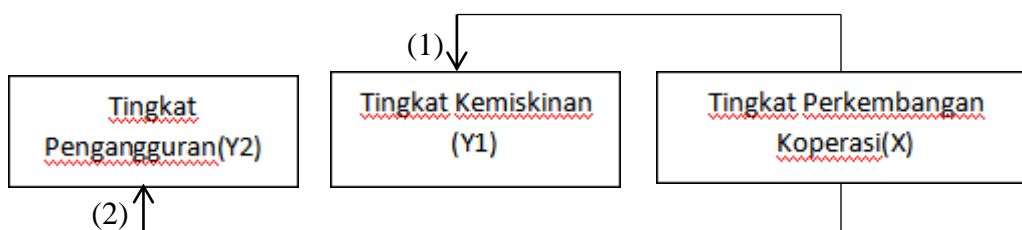
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup data: (1) jumlah koperasi aktif dan tingkat perkembangan, (2) jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran, (3) jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif adalah penyajian dan penyusunan data ke dalam bentuk tabel ataupun grafik sedangkan pendekatan kuantitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan Analisis regresi berganda dan Korelasi Pearson untuk membuktikan Hipotesa.

Secara garis besar rancangan penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Rancangan Penelitian



Berdasarkan gambar 2, maka hipotesis adalah :

1. H_0 : Tidak ada pengaruh perkembangan koperasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan

2. Ho : Tidak ada pengaruh perkembangan koperasi terhadap tingkat pengangguran di provinsi Sumatera selatan

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Tabel 2. Pengaruh perkembangan koperasi terhadap kemiskinan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,281	1	,281	,041	,844 ^b
Residual	82,952	12	6,913		
Total	83,233	13			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Koperasi

Hasil uji hipotesis variabel kemiskinan (Y_1) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,844 > 0,05$, maka variabel perkembangan koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 3. Pengaruh perkembangan koperasi terhadap pengangguran

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,679	1	,649	,197	,665 ^b
Residual	41,429	12	3,452		
Total	42,107	13			

a. Dependent Variable: Pengangguran

b. Predictors: (Constant), Koperasi

Hasil uji hipotesis variabel pengangguran (Y_2) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,665 > 0,05$, maka variabel perkembangan koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Uji Regresi

Koefisien regresi variabel koperasi sebagai variabel bebas dengan variabel kemiskinan sebagai variabel terikat bertanda bertanda negatif, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat berbanding terbalik.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta

1	(Constant)	15,026	,729	
	Koperasi	-,014	,069	-,058

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sementara, koefisien regresi variabel koperasi sebagai variabel bebas dengan variabel pengangguran sebagai variabel terikat bertanda positif menunjukkan bahwa adanya hubungan searah antara variabel bebas dan variabel terikat.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	6,083	,515	
	Koperasi	,022	,049	,127

a. Dependent Variable: Pengangguran

Koefisien Determinasi

Hasil uji R^2 pada penelitian untuk kemiskinan, diperoleh nilai sebesar 0,003, ini berarti pengaruh perkembangan koperasi terhadap kemiskinan hanya sebesar 0,3%. Sedangkan sisanya sebesar 99,97% dipengaruhi oleh variabel lain.

Selanjutnya, hasil uji R^2 pada penelitian ini untuk tingkat pengangguran, diperoleh nilai sebesar 0,16. Ini menunjukkan bahwa pengaruh perkembangan koperasi terhadap pengangguran sebesar 1,6%. Sedangkan sisanya sebesar 98,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh perkembangan koperasi terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil uji signifikansi, perkembangan koperasi di provinsi Sumatera Selatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan mempunyai hubungan yang lemah dengan koefisien korelasi sebesar 0,005 selama periode 2006-2019. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2014) dengan judul Optimalisasi Peran Koperasi Sebagai Wadah Usaha Bersama Mengentaskan Kemiskinan bahwa Peran koperasi yang memberikan banyak keuntungan ekonomi bagi anggotanya akan dapat membebaskan anggotanya untuk terlepas dari jerat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Semaun (2018) dengan judul Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat memberikan kesimpulan bahwa Model pemberdayaan koperasi wanita melalui pendekatan usaha produktif, melalui pembenahan kembali kinerja dan pengendalian usaha simpan pinjam, diharapkan dapat meningkatkan inisiatif wanita dalam berkiprah mengembangkan usaha diri dan koperasi menuju kesejahteraan bersama.

Devanty, et al (2017) dalam penelitian yang berjudul Peran Koperasi Wanita Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, memberikan hasil bahwa taraf hidup anggota koperasi wanita tergolong sejahtera.

Pengaruh perkembangan koperasi terhadap pengangguran

Hasil uji signifikansi, perkembangan koperasi di provinsi Sumatera Selatan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan mempunyai hubungan yang lemah dengan koefisien korelasi sebesar 0.127 selama periode 2006-2019. Hasil penelitian ini berbeda dengan rekomendasi yang diberikan oleh ILO pada Asia Pacific Workshop on Youth and University Cooperative (2015), bahwa koperasi harus berperan aktif dalam mengurangi pengangguran. Akan tetapi, koperasi tidak bisa menyelesaikan masalah pengangguran seorang diri, karena perlu banyak pihak yang terlibat seperti perusahaan swasta, investor dan pihak-pihak yang dapat membuka lapangan kerja.

Hal uji tersebut juga berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten PARIAMAN Sumatera Barat, dimana pemerintah daerah telah membuat kebijakan dengan memaksimalkan peran koperasi sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran karena koperasi dinilai mampu memberikan peran berarti dalam kehidupan perekonomian masyarakat, (Antara, 2017)

Kendala Pengembangan Koperasi

Koperasi di Indonesia kesulitan dalam berkembang, disebabkan oleh faktor internal, yaitu pengurus, keanggotaan serta modal, sedangkan masalah eksternal berasal dari pesaing dan keinginan masyarakat yang masih rendah untuk menjadi anggota koperasi. Penelitian tentang permasalahan yang dihadapi oleh koperasi secara parsial telah dilakukan oleh Mubarak, et al (2018) dengan judul Analisis Identifikasi Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Banyuwangi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anggota, menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi Koperasi di Kabupaten Banyuwangi antara lain ketidakpercayaan anggota pada pengurus, keterbatasan SDM serta kesulitan manajemen tiap-tiap blok/keterbatasan pengetahuan.

Kurniawati, et al (2017) dalam penelitian dengan judul Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang Sebagai Dasar Penyusunan Strategi, menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Subang adalah Rendahnya SDM, akses pembiayaan, akses pasar dan penggunaan teknologi tepat guna.

Selanjutnya permasalahan koperasi secara nasional, menurut penelitian yang dilakukan Sitepu, et al (2018) dengan judul Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia, menyimpulkan perkembangan koperasi di Indonesia menghadapi masalah intern yang mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, manajer dan karyawan

koperasi serta masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan usaha-usaha lain dan juga dengan instansi pemerintah.

Dalam Rakornas bidang KUKM (2018, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan (2018), terdapat 5 (lima) permasalahan KUKM yang hadapi, yaitu : (1) lemahnya SDM Pembina di Kab/Kota dan SDM Pengelola Koperasi, (2) masih terbatasnya akses pasar terhadap hasil KUKM, (3) masih kurangnya kesadaran UKM untuk membuat surat Izin Usaha Mikro, (4) masih kurangnya kesaadaran pengurus koperasi untuk mengetahui aturan tentang perkoperasian dan (5) masih terbatasnya penyerapan dana KUR dan LPDB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan : (1) tidak terdapat pengaruh perkembangan koperasi terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di provinsi Sumatera Selatan selama periode 2006-2019. (2) Koperasi belum mempunyai pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran karena koperasi itu sendiri masih memiliki permasalahan baik internal maupun eksternal.

REFERENSI

- Asia Pacific Workshop On Campus And Youth Cooperatives. 2015.
- Azhari. 2017. Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 47-52.
- Devanty,Cyntia Putri.,Saskara,Ida Ayu Nyoman. 2017. Peran Koperasi Wanita Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita Di Kecamatan Blanbatuh Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*. 6(4),648-676.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. (2018). *Rapat Koordinasi Nasional Bidang KUKM*. Yogyakarta.
- Hejazziey , Djawahir. 2009. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Pengurangan PENGANGGURAN. *Jurnal Al-Iqtishad: I(1)*, 31- 52 .
- Ikbal, Muhammad.,Mustafa, Sri Wahyuni.,Bustami, Lanteng. 2018. Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(1),35-46
- Imsar. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 198-2016. *HUMAN FALAH : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 145-164
- Kantor Berita Antara. 2017. *Kurangi Pengangguran, Pariaman Maksimalkan Peran Koperasi*.

- Kurniawati, Kezia., Waruwu, Benny Shan F., Pribadi, Rangga. 2017. Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang Sebagai Dasar Penyusunan Strategi. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 54-73.
- Mubarok, Nurul., Jannah, Sinta Ardhilatuyl., Laksanawati, Septi. 2018. Analisis Identifikasi Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Banyuwangi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anggota. *I-Economic* 4(2). 194-213.
- uljono, Djoko. (2013). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Murtyoso, Cahyo Hatta. (2018). Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran dengan memanfaatkan Potensi Produk Unggulan (Studi Kasus di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 1-16.
- Nugroho, Rosalendo Eddy. 2016. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengangguran di Indonesia. *Jurnal PASTI*, 10(2), 177-191.
- Nurlaili, Eka Indah. (2014). Optimalisasi Peran Koperasi Sebagai Wadah Usaha Bersama Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(3), 1-7.
- Putriana. 2012. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Kutubkhanah*, 15(2), 117-129.
- Semaun, Syariyah. 2018. Eksistensi Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Al-Mayyah*. 11(2), 189-213.
- Sitepu, Camelia Fanny., Hasyim. 2018. Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia. *Jurnal Niagawan*, 7(2), 59-68.
- Setiawan, Rendi Dwi. 2017. Peran UMKM Dalam Upaya Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan : Pelajaran dari Penerapan JATIMNOMICS di Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2), 1-18.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2016. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan : Pengalaman Kota Bandung. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, 2(1), 109-128.
- Sugiyono. (2014). *Statistik untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono. (2011). *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. Edisi ketiga. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- UU Nomor 17 Tahun 2012.